

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Adrian Sutedi. *Hukum Pertanahan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Akur Nurasa, Dian Aries Mujiburohman. *Tuntunan Pembuatan Akta Tanah (Buku Ajar)*. Yogyakarta: STPN Press, Edisi I, November 2020.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Effendi Perangin. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1964.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Jakarta: BEE Media Indonesia, cetakan terbaru, 2007.
- Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals, translated by Mary Gregor*, Cambridge University Press, 1996.
- Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals, translated by Mary Gregor*, Cambridge University Press, 1998.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005.
- Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008.

- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Robert P. George, *Constitutional Conservatism: Liberty, Self-Government, and Political Moderation*, Oxford University Press, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008,
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI-Press, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, New York: Benziger Brothers, 1947.
- Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. 5, 2012.

Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Hukum dan Praktik Pelaksanaannya*, Jakarta: Kencana, 2017.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.

Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2010.

B. Jurnal dan Artikel

Agus Purwo Saputro, Miftakhul Huda. “Kepastian Hukum Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembayaran Harga Tanah yang Belum Dilunasi Pembeli.” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, 2024.

A.R Amalita, Sulistyandari, Tri L. Prihatinah, “The Validity of the Deed of Sale and Purchase and the Deed of Granting Rights and Legal Consequences for the Winner of the Auction Based on a Mock Agreement,” *Journal of Social Research*, Vol. 3, No. 4, 2024.

Conor Crummey, “One-System Integrity and the Legal Domain of Morality,” *Legal Theory*, Vol. 28, No. 3, 2022.

Della Kristina, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, “Pertanggungjawaban Hukum PPAT atas Akta Jual Beli Tanah yang Batal karena Sertifikat Ganda: Perspektif Hukum Perdata dan Administrasi Pertanahan,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4, No. 4, 2025.

Dian Anggraini Wahyuningrum dan Siti Malikhatus Badriyah, “Perlindungan Hukum Untuk Pembeli Akibat Kelalaian PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah,” *Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024.

Gusti Made Nopiani, I Made Mulyawan Subawa, I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Melakukan Proses Jual Beli atas Tanah di Kantor PPAT, *Jurnal IUS*, Vol. 12, No. 1, 2022.

I Gusti Bagus Yoga Prawira. Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Iwan Chandra, Agus Salim, Belly Isnanei. Tanggung Jawab PPAT terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah yang Menjadi Objek Sengketa Ditinjau dari PP Nomor 24 Tahun 2016. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3, No. 5, 2024.

- Lumban Tobing, A. H., Limbong, D., Isnaini, I. "Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Meri Diana Citasari, Nafsiatun Nafsiatun, Uti Asikin, Perlindungan Hukum PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Yang Objeknya Mengalami Tumpang Tindih, *Jurnal TABJ*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Mugiyatno, Diyono, Akhmad Khisni, "Responsibilities of Deed Land Builders Officers (PPAT) in Making Buy and Sell Deed Land Dispute (Analysis of Supreme Court Decision No. 826 K/Pdt/2018)," *Jurnal Akta*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Ni Made Nita Pradnyaning Putri dan I Wayan Novy Purwanto, "Urgensi Pengaturan Akta Pembatalan Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Olivia Ramadhani Dezytasari. Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan. *Jurnal Notariat*, 2020.
- Saputra, I. S., Ismail, I., & Darmawan, D. Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Sinaga, N.A. Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No.1, 2019.
- Putra Hutomo. "Pemanfaatan Hak Pengelolaan (HPL) dalam Rangka Pemenuhan Tempat Tinggal melalui Pembangunan Rumah Susun di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Syarifah Lia, Lathifah Hanim. "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak)". *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Wulandari, C. Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, 2020.

Yuliana I.S, “Batal Demi Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat PPAT Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Smn,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1*, 2025.

Yovita Christian Assikin, dkk. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan dengan Dibataalkannya Akta Jual Beli Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. *Acta Comitatus, Vol. 5, No. 1*, 2019.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PPAT.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PPAT.

D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatalan-perjanjian-cl4141/> (Diakses pada 18 September 2025, pukul 17.06 WIB).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5> (Diakses 18 September 2025, pukul 17.20 WIB).

<https://www.legalserviceindia.com/legal/article-13625-kelsen-s-pure-theory-of-law.html> (diakses pada 13 November 2025, pukul 03.53 WIB).

SP Law Office, Kebatalan dalam Hukum Perdata: Apa Saja Syarat Sah Perjanjian? Diakses dari <https://splawoffice.co.id/kebatalan-dalam-hukum-perdata-apa-saja-syarat-sah-perjanjian/> (Diakses 18 September 2025, pukul 17.35 WIB).